



## KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

**Salsabila Kamariah Kawatak**

Universitas Holu Oleo, Indonesia

Corresponding Author: [salsabila12@gmail.com](mailto:salsabila12@gmail.com)

### Info Article

Received :  
10 Maret 2023  
Revised :  
07 April 2024  
Accepted :  
01 Mei 2024  
Publication :  
31 Mei 2024

### Keywords:

*Financial Performance, Ratio, Local Revenue*

### Kata Kunci:

Kinerja Keuangan, Rasio, Pendapatan Asli Daerah

*Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*



**Abstract:** *This research is entitled Konawe Islands Regency Regional Financial Performance. The aim is to find out the Regional Financial Performance of Konawe Islands Regency. The method of analysis is to use a comparative descriptive method that describes the financial performance of the Regional Government and uses financial ratios. The results showed that data processing and data analysis results that refer to the problems and research objectives, can be concluded as follows, The development of the effectiveness level of regional financial management in Kolaka Regency during the 2016-2020 fiscal year can be said to be very effective, namely by having an average effectiveness ratio above 100%. For further research, it is hoped that researchers can compare the financial performance of regencies or cities that have great potential in managing their regional finances, so that the research results have a clearer contribution that there are certain regencies or cities that have better financial performance than other regencies or cities.*

**Abstract:** Penelitian ini berjudul Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Tujuannya adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Metode analisisnya adalah menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah dan menggunakan rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, kinerja keuangan dari sisi kemandirian keuangan daerah, terlihat kurang mandiri atau masih bersifat instruktif karena memiliki rata-rata 6,51% (>25%), untuk rasio efektivitas pendapatan asli daerah di kabupaten Konawe Kepulauan presentase rata-ratanya sebesar 138,93% yang berarti pemungutan pendapatan asli daerah cenderung stabil atau sangat efektif, sedangkan untuk kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan asli daerah secara keseluruhan memiliki presentase rata-rata sebesar 31,78% yang berarti kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD masih kurang efektif.

## PENDAHULUAN

Dengan diimplementasikannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, era otonomi daerah dimulai di Indonesia. Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada era otonomi daerah, terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan cerminan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu. APBD dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan.

Halim (2007) mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah tersebut perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel sehingga diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya.

Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu system yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja. Anggaran Kinerja pada dasarnya merupakan pembangunan suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan sehingga akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan public, yang berorientasi pada kepentingan public (*Public Oriented*).

Pendapatan Asli Daerah menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian pula sebaliknya, apabila PAD yang diperoleh pada daerah tersebut semakin sedikit atau mengalami penurunan, berarti penyelenggaraan otonomi daerahnya belum maksimal.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mencatat, mengukur, menilai, dan mencapai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Jika kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan baik dan benar maka semakin baik pengelolaan keuangan baik dalam hal pengelolaan belanja modal yang dilakukan oleh daerah tersebut. Untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan belanja modal dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, melakukan analisis rasio keuangan pada APBD dapat bertujuan untuk membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode yang dibandingkan dengan periode sebelumnya dan dapat diketahui kecenderungan yang terjadi pada suatu daerah. Kinerja keuangan tersebut biasanya dinyatakan dengan rasio keuangan yang diidentifikasi dari laporan keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2007).

Indra Bastian (2001: 337) menyatakan bahwa indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan dalam mengukur tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan tetap berpedoman pada elemen indikator kinerja. Elemen indikator kinerja terdiri atas lima elemen yaitu: 1) Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu baik berupa dana, sumber daya manusia, maupun informasi yang diperlukan dalam menjalankan /melaksanakan kegiatan demi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. 2) Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diperoleh dari suatu kegiatan yang telah dilakukan baik berupa barang maupun jasa. 3) Indikator hasil (outcome) adalah hasil suatu kegiatan yang dapat diterima/dirasakan secara langsung oleh pihak lain/masyarakat dalam jangka menengah. 4) Indikator manfaat (benefit) adalah manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat/pihak lain atas hasil kerja pemerintah atau organisasi tertentu. 5) Indikator dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan dari kegiatan yang telah dilakukan. Indikator dampak, misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengukuran pendapatan masyarakat.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya

guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pusat. Pemerintah daerah juga memiliki fleksibilitas dalam menggunakan dananya sesuai dengan aturan yang berlaku (Syamsi, 1986).

Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah membantu memperbaiki kinerja pemerintah, mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan, serta mewujudkan akuntabilitas publik. Menurut Mardiasmo, (2002: 169) Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah kabupaten masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan .

Berbagai penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa ahli antara lain, I Dewa Gede Bisma dan Hery Susanto (2010), yang menyatakan bahwa Berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah, secara umum Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2003- 2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain; Ketergantungan Keuangan Daerah Sangat Tinggi terhadap Pemerintah Pusat sehingga tingkat Kemandirian Daerah Sangat Kurang. Desentralisasi Fiskal Cukup mengingat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Efektifitas pengelolaan APBD Sangat Efektif, namun Efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil Tidak Efisien.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Mamesah (1995:20) dalam Halim (2007: 16) adalah rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, di mana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud. Di Era (pasca) reformasi, bentuk APBD mengalami perubahan cukup mendasar.

Bentuk APBD yang baru didasari pada peraturan-peraturan mengenai Otonomi Daerah terutama UU No. 22/1999 yang telah diubah menjadi UU No. 32/2004 yang telah diubah menjadi UU No. 33/2004, PP No. 105/2000. Akan tetapi, karena untuk

menerapkan peraturan yang baru diperlukan proses, maka untuk menjembatani pelaksanaan keuangan daerah pada kedua era tersebut dikeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.903/2375/SJ tanggal 17 November 2001. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk mengakomodasi transisi dari UU No. 5/1974 ke UU No. 22/1999 yang kini telah diubah menjadi UU No. 32/2004. Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan makin informatif. Untuk itu, dalam bentuk yang baru, APBD diperkirakan tidak akan terdiri dari dua sisi dan akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu Penerimaan, Pengeluaran dan Pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori yang baru yang belum ada di era pra reformasi. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD makin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan menurut (Halim, 2002:126). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah menurut (Halim, 2002:128). Yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisien keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

Daerah Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard

(dalam Halim, 2004) memperkenalkan empat macam pola hubungan hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

- a) Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b) Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c) Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d) Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Total pendapatan asli daerah}}{\text{Transfer pusat+provinsi+pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2010)

Tabel 1.1 Pola Hubungan Kemampuan Keuangan Daerah

<b>Kemampuan keuanga</b>	<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Pola hubungan</b>
<b>Rendah sekali</b>	0-25	Instruktif
<b>Rendah</b>	25-50	Konsultatif
<b>Sedang</b>	50-75	Partisipatif
<b>Tinggi</b>	75-100	Delegatif

Sumber : Halim (2004)

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Pramono, 2014: 23). Pemerintah daerah dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, tetapi semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2010)

Tabel Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan Daerah	Kriteria Efektivitas
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup efektif
75-89%	Kurang efektif
<75%	Tidak efektif

Sumber : Mahmudi (2010)

Analisis kontribusi adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi disumbangkan dari sumber sumber pendapatan terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah. Rumus untuk menghitung kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD

$$X \frac{Py}{PAD} \times 100\%$$

X = Jumlah kontribusi yang diberikan

Py = Jumlah penerimaan dari sektor Pajak Daerah/Retribusi Daerah/ Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan/ lain-lain PAD yang sah.

Masita Macmud, George Kawung dan Wensy Rompas (2014) juga melakukan penelitian tentang kinerja keuangan daerah dan hasil dari penelitian itu adalah Berdasarkan hasil penelitian, dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun sehingga beberapa rasio keuangan masih menunjukkan trend positif dan trend negatif. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih belum matang didalam pengelolaan sumber daya daerah yang tersedia dan pendapatan daerah yang diterima. Hal ini dapat dijelaskan dari penelitian yang menggunakan beberapa rasio keuangan antara lain rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan.

Selain itu, Arthaingan H.Mutiha (2016) juga melakukan penelitian yang dimana hasil dari penelitiannya itu adalah dari penelitian ini disimpulkan bahwa rasio tingkat kemandirian keuangan kota Bogor memiliki hubungan yang konsultatif, di sisi lain, pemerintah kota Bogor sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya,

serta memiliki rasio pertumbuhan yang positif. Namun pemerintah kota Bogor masih memprioritaskan anggarannya dalam belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung.

Kabupaten Konawe Kepulauan adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, dengan ibukota Langara, yang terletak di kecamatan Wawonii Barat. Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Konawe yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 12 April 2013 di gedung DPR RI tentang Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB). Pada tahun 2020, jumlah penduduk kabupaten Konawe Kepulauan tercatat sebanyak 38.849 jiwa yang terdiri dari 19.665 laki-laki dan 19.184 perempuan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini yang menjadi rumusan permasalahan adalah: Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Konawe Kepulauan selama lima tahun terakhir (Tahun 2016-2020) dengan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, efektifitas sumber-sumber PAD, serta kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD.

Tujuan dari penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2016-2020 adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan selama lima tahun terakhir (2016-2020) dengan menganalisis rasio kemandirian keuangan daerah, efektifitas sumber-sumber PAD serta kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD.

## **METODE PENELITIAN**

Objek dalam penelitian ini adalah laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2016-2020 dan anggaran atau target Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Konawe Kepulauan. Data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data yang telah tersedia dan telah di proses. Sumber data tersebut berasal dari website kementerian keuangan.

Metode ini dilakukan untuk meneliti bagaimana efektifitas PAD di kabupaten konawe kepulauan. Metode analisis yang akan di gunakan adalah deskriptif kuantitatif. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menghitung Rasio kemandirian keuangan daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Total pendapatan asli daerah}}{\text{Transfer pusat+provinsi+pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber mahmudi (2010)

## 2. Menghitung Rasio Efektivitas PAD

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2010)

## 3. Menghitung kontribusi sumber-sumber PAD terhadap PAD

$$X \frac{Py}{PAD} \times 100\%$$

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian

Kabupaten Konawe Kepulauan adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, dengan ibukota Langara, yang terletak di kecamatan Wawonii Barat. Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Konawe yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 12 April 2013 di gedung DPR RI tentang Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB). Pada tahun 2020, jumlah penduduk kabupaten Konawe Kepulauan tercatat sebanyak 38.849 jiwa yang terdiri dari 19.665 laki-laki dan 19.184 perempuan.

Kabupaten Konawe Kepulauan (Pulau Wawonii) merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelantikan Pejabat Bupati pertama kalinya dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2013. Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) pemekaran dari Kabupaten Konawe dan berada dalam gugusan Pulau-Pulau di bagian Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di sebelah Pulau Buton dan Kota Kendari. Wilayahnya di posisi sangat strategis karena perairan lautnya di lalui oleh jalur pelayaran kawasan timur dan barat indonesia, berada pada kawasan yang sangat potensial yakni diapit oleh Laut Banda dan Selat Buton yang memiliki potensi sumberdaya keragaman hayati kelautan dan perikanan cukup besar.

Perhitungan kinerja keuangan daerah menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD.

## 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel Data PAD, bantuan pemerintah pusat dan pinjaman tahun 2016-2020

Tahun anggaran	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya	PAD	Presentase	Pola Hubungan
2016	1,275,000,000	5,110,560,000	4,01%	Instruktif
2017	-	8,114,571,900	-	-
2018	-	9,715,941,782	-	-
2019	108,914,240,219	9,807,625,424	9,01%	Instruktif
2020	-	10,660,300,000	-	-

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Persentase perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah masih kurang stabil karena data yang ada menunjukkan mengalami kenaikan.

Dari perhitungan tabel di atas diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten konawe kepulauan mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 4,01% dan pada tahun 2019 naik menjadi 9,01% walapun pola kemandiriannya masih bersifat instruktif.

## 2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel Target dan Realisasi PAD serta Efektivitas

Kab. Konawe Kepulauan TA 2016-2020

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2016	9,717,841,083	5,110,560,000	190,15%	Sangat Efektif
2017	11, 873,313,479	8,114,571,900	146,32%	Sangat Efektif
2018	15,097,104,763	9,715,941,782	155,38%	Sangat Efektif
2019	10,707,557,475	9,807,625,424	109,18%	Sangat Efektif
2020	9,978,471,640.60	10,660,300,000	93,60%	Cukup Efektif
<b>Rasio rata-rata</b>				<b>138,93%</b>

Sumber : Data Diolah

Setelah dilakukannya perhitungan rasio efektifitas maka pada bagian ketiga ini, kami akan menganalisis tingkat efektifitas PAD kab. Konawe Kepulauan tahun 2016-2020 diuraikan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2016 rasio efektifitas kabupaten konawe kepulauan sebesar 190,15% yang dimana kemampuan keuangan pada tahun 2016 sangat efektif. Hal ini menggambarkan pencapaian PAD pada tahun 2016 melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp.4,607,281,083. Realisasi PAD pada tahun 2016 sebesar Rp.9,717,841,083 dan target yang ditetapkan sebesar Rp. 5,110,560,000.
2. Pada tahun 2017 rasio efektifitas kabupaten Konawe Kepulauan mengalami penurunan sebesar 43,83% dari tahun 2016 dimana pada tahun 2017 menjadi sebesar 146,32%. Kemampuan keuangan pada tahun 2016 sangat efektif. Realiasi PAD kab. Konawe Kepulauan melampaui target yang telah di tetapkan Rp. 3,758,741,579 dari total anggaran sebesar Rp. 8,114,571,900 dengan realisasi PAD sebesar Rp. 11, 873,313,479.
3. Pada tahun 2018 rasio efektifitas kabupaten Konawe Kepulauan mengalami peningkatan sebesar 9,06% dimana pada tahun 2018 rasio efektifitasnya sebesar 155,38%. Kemampuan keuangan pada tahun 2018 sangat efektif. Realiasi PAD kab. Konawe Kepulauan melampaui target yang telah di tetapkan Rp. 5,381,162,981 dari total anggaran sebesar Rp. 9,715,941,782 dengan realisasi PAD sebesar Rp. 15,097,104,763.
4. Pada tahun 2019 rasio efektifitas kabupaten Konawe Kepulauan mengalami penurunan kembali sebesar 46,2% penurunan ini lebih besar dibandingkan dengan penurunan pada tahun 2017, pada tahun 2018 rasio efektifitasnya sebesar 109,18%. Kemampuan keuangan pada tahun 2019 sangat efektif. Realiasi PAD kab. Konawe Kepulauan melampaui target yang telah di tetapkan Rp. 899,932,051 dari total anggaran sebesar Rp. 9,807,625,424 dengan realisasi PAD sebesar Rp. 10,707,557,475.
5. Pada tahun 2020 rasio efektifitas Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami penurunan kembali sebesar 15,58% , dimana pada tahun 2020 rasio efektifitas sebesar 93,60%. Kemampuan keuangan pada tahun 2020 cukup efektif. PAD Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 9,978,471,640,60.

## 3. Kontribusi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Data sumber – sumber PAD di Kabupaten Konawe Kepulauan 2016 – 2020

Tahun Anggaran	Pajak daerah	Retribusi daerah	Hasil kekayaan yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	PAD
2016	728,000,000	15,000,000	-	4,367,560,000	5,110,560,000
2017	728,000,000	115,000,000	400,000,000	6,871,571,900	8,114,571,900
2018	884,000,000	175,000,000	400,000,000	8,256,941,782	9,715,941,782
2019	884,000,000	530,000,000	400,000,000	7,993,625,424	9,807,625,424
2020	958,000,000	600,000,000	1,800,000,000	7,302,300,000	10,660,300,000

Sumber : Data Diolah

Tabel presentase kontribusi jenis-jenis sumber pendapatan terhadap PAD  
(Pendapatan Asli Daerah)

## 1. Pajak daerah

Tahun Anggaran	Pajak daerah	PAD	Presentase
2016	728,000,000	5,110,560,000	142,45%
2017	728,000,000	8,114,571,900	8,97%
2018	884,000,000	9,715,941,782	9,1%
2019	884,000,000	9,807,625,424	9,01%
2020	958,000,000	10,660,300,000	8,97%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel di samping dapat di lihat bahwa besarnya kontribusi pajak terhadap PAD mengalami naik turun. Pada tahun 2016 kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 142,45% tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 8,96%, tahun 2018 naik menjadi 9,1 dan tahun 2019 sebesar 9,01% setelah itu pada tahun 2020 turun kembali menjadi 8,97%

## 2. Retribusi Daerah

Tahun Anggaran	Retribusi Daerah	PAD	Presentase
2016	15,000,000	5,110,560,000	0,29%
2017	115,000,000	8,114,571,900	1,42%
2018	175,000,000	9,715,941,782	1,80%
2019	530,000,000	9,807,625,424	5,40%
2020	600,000,000	10,660,300,000	5,63%

Sumber : Data Diolah

Dari hasil tabel disamping dapat di liat bahwa, besarnya kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan walaupun relatif kecil. Pada tahun 2016 presentase retribusi Daerah terhadap PAD sebesar 0,29%, 2017 sebesar 1,42%, 2018 sebesar 1,80%, 2019 sebesar 5,40% dan pencapaian terbesar berada pada tahun 2020 dengan presentase retribusi daerah terhadap PAD sebesar 5,63.

### 3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

<b>Tahun anggaran</b>	<b>Hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan</b>	<b>PAD</b>	<b>Presentase</b>
2016	-	5,110,560,000	-
2017	400,000,000	8,114,571,900	4,93%
2018	400,000,000	9,715,941,782	4,12%
2019	400,000,000	9,807,625,424	4,08%
2020	1,800,000,000	10,660,300,000	16,89%

Sumber : Data Diolah

Dari hasil presentase di samping dapat diketahui, kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan pada tahun 2016 di daerah konawe kepulauan tidak ada hasil pengelolaan kekayaan uang di pisahkan. Pada 2017-2019 mengalami penurunan, pada tahun 2017 presentase hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan sebesar 4,93% setelah itu, pada tahun 2018 turun menjadi 4,12% dan tahun 2019 turun kembali menjadi 4,08%. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan ulang sebesar 16,89% dan pada tahun 2016 di daerah konawe kepulauan tidak ada hasil pengelolaan kekayaan uang di pisahkan.

### 4. Lain-lain PAD yang sah

<b>Tahun anggaran</b>	<b>Lain-lain PAD yang sah</b>	<b>PAD</b>	<b>Presentase</b>
2016	4,367,560,000	5,110,560,000	85,46%
2017	6,871,571,900	8,114,571,900	84,68%
2018	8,256,941,782	9,715,941,782	84,98%
2019	7,993,625,424	9,807,625,424	81,50%
2020	7,302,300,000	10,660,300,000	68,50%

Sumber : Data Diolah

Dari hasil presentase tabel di samping dapat di ketahui bahwa kontribusi dari lain-lain PAD yang sah terhadap PAD pada tahun 2016 presentase lain-lain PAD yang sah terhadap PAD sebesar 85,46% kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 84,68%, pada tahun 2018 naik kembali menjadi 84,98% dan pada dua tahun terakhir ini mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 81,50% dan tahun 2020 sebesar 68,50%

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, kinerja keuangan dari sisi kemandirian keuangan daerah, terlihat kurang mandiri atau masih bersifat instruktif karena memiliki rata-rata 6,51% (>25%), untuk rasio efektivitas pendapatan asli daerah di kabupaten Konawe Kepulauan presentase rata-ratanya sebesar 138,93% yang berarti pemungutan pendapatan asli daerah cenderung stabil atau sangat efektif, sedangkan untuk kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan asli daerah secara keseluruhan memiliki presentase rata-rata sebesar 31,78% yang berarti kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD masih kurang efektif.

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dilakukan, maka saran-saran yang mungkin berguna untuk pemerintah kabupaten Konawe Kepulauan yaitu: Pemerintah harus meningkatkan kemandirian keuangannya, Untuk meningkatkan tingkat kemandirian Kabupaten Konawe Kepulauan pemerintah daerah yang bersangkutan harus dapat menggali dan meningkatkan kemampuannya dalam menggali sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan PAD, sehingga tidak bergantung sepenuhnya lagi pada bantuan pemerintah pusat dalam melaksanakan kegiatan, maka hal yang dapat dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan peningkatan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditiya, W. F. ., Qolbi, S. W. ., Aiman, A. N. ., Widyawati, W. ., & Latifah, E. . (2023). PELUANG DAN TANTANGAN SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 2(01), 11–20. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i01.538>
- Amalia dan Pratolo. (2013). ANALISIS TERHADAP DUGAAN PEMANFAATAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN OLEH INCUMBENT DALA PEMILUKADA

- SERTA EFEKTIVITASNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH.  
*Jurnal Akuntansi & Investasi* Vol. 14 No. 1, (1-13)  
<http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/492/784> .
- Arifin, A. ., Amang, B. ., & Ramlawati, R. (2022). PERBANDINGAN PENETAPAN TARIF PEMBAYARAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA BAUBAU. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(04), 343–355.  
<https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i04.459>
- Arusani, A., Kusuma, U. W. ., & Harimau, L. I. . (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(02), 123–136. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i02.53>
- Boni Saputra, R. F. (2017). KONTRIBUSI SUMBER-SUMBER PAD DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN . *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 19.
- Bisma dan susanto. (2010). EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2003-2007. Universitas Mataram. Mataram. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Vol 4. No. 3. (2010) <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/12.-I-Dewa-Gde-Bisma>.
- Ernawati, E. (2022). ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP DEVIDEN PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TAHUN 2012-2016. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(03), 263–280. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i03.269>
- Fahlevi dan Anantha. (2015). ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS ANGGARAN BELANJA LANGSUNG - STUDI PADA SKPD DI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH. Universitas Syah Kuala. Aceh. *JIAP* Vol 2. (2015) <http://www.rp2u.unsyiah.ac.id>
- Fredy. (2022). PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA PADA SEKRETARIAT DPRD BUTON. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(01), 56–73.  
<https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i01.132>

- H.Mutiha, A. (2016). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *JURNAL VOKASI INDONESIA*, 17.
- I DEWA GDE BISMA, H. S. (2010). EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH. *GaneÇ Swara Edisi Khusus* , 13.
- Indrianti, T. . (2024). HUBUNGAN PEMBAGIAN KERJA DAN WEWENANG KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PADA BRI KOTA KENDARI. *JIEM : Journal Of International Entrepreneurship And Management*, 1(02), 166–189. <https://doi.org/10.62668/jiem.v1i02.1063>
- Irwan, I., Adam, P., & Razak, A. (2024). PENGARUH PEMBERDAYAAN KERJA, KARAKTERISTIK PEKERJAAN, DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KOLAKA TIMUR. *JIM : Journal Of International Management*, 3(01), 27–45. <https://doi.org/10.62668/jim.v3i01.1009>
- La Ode Farum. (2022). ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA INDONESIA . *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(01), 35–47. <https://doi.org/10.62668/jiar.v1i01.119>
- Littamahuputti, Kumenaung dan Tolosang. (2015). ANALISIS KINERJA PENERIMAAN DAN BELANJA DAERAH(STUDI PADA APBD KOTA MANADO). Universitas Sam Ratulangi. Manado <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/viewFile/6442/5969>
- Muslim, C. ., Saenong, Z. ., & Hastuti, H. (2023). PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI 2015-2021. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(04), 233–240. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i04.930>
- Masita Machmud, G. K. (2014). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* , 13.
- Ni Ketut Erna Rahmawati, I. W. (2016). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 29.
- Pardana, D. (2022). ANALISIS NILAI JUAL OBJEK PAJAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02), 103–116. <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.557>

- Rahmatia. (2022). ANALISIS RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BAUBAU. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(01), 74–87. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i01.133>
- Rahmayati, A. (2015). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO . *Jurnal EKA CIDA*, 15.
- Ramadhani, F. R. (2016). ANALISIS KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH DIKOTA TARAKAN TAHUN 2010-2015. *JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN*, 14.
- Rais R, M. . (2023). EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BAUBAU . *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 1–11. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i01.507>
- Riaweni, W. O. I. ., Sutrisno, A. ., Musliani, M., & Masna, M. (2022). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA BUMBES BERSAMA DESA KAPOTA. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(02), 155–164. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i02.60>
- Rudi Abdullah. (2022). ANALISIS KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG DIKAITKAN DENGAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2017-2021. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(01), 37–44. <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i01.124>
- Saenong, Z. ., Muslimin, M. ., & Nur Afiat, M. . (2022). ANALISIS POTENSI RETRIBUSI DAERAH KOTA KENDARI. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(02), 100–106. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i02.54>
- Sarnani. (2022). ANALISIS BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU . *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(01), 10–24. <https://doi.org/10.62668/jjar.v1i01.117>
- Sri Ayu Ningsih. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN SERTA KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA . *JJAR : Journal Of*

- International Accounting Research*, 1(01), 25–34.  
<https://doi.org/10.62668/jiar.v1i01.118>
- Sumenge, Ariel. (2013). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) MINAHASA SELATAN. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA*. Vol 1, No 3. 2013).  
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/1941/1538>
- Sutrisno, A. ., Arusani, A., Diana, L. ., & Fatmawati, F. (2022). ANALISIS ALOKASI BELANJA DAERAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN WAKATOBI. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(02), 156–180.  
<https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i02.62>
- Susi Sulastrri. (2022). ANALISIS DANA DESA SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016-2019. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(01), 28–37. <https://doi.org/10.62668/jide.v1i01.113>
- Surni, S., Riaweni, W. O. I. ., Rostina, R., & Fatmawati, F. (2022). TINJAUAN PELAKSANAAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK DAN ARSIP KABUPATEN WAKATOBI . *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(03), 181–193.  
<https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i03.61>
- Suyono, S., Abbas, B. ., & Putera, A. . (2024). PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU, MANAJEMEN KONFLIK DAN KOMITMEN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN TONGAUNA KABUPATEN KONAWE. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 3(01), 01–19.  
<https://doi.org/10.62668/jide.v3i01.1013>
- Syamsir, S., Razak, A., & Yunus, A. (2024). PENGARUH KETERLIBATAN KERJA, PENGAWASAN DAN KARAKTERISTIK PEKERJAAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS I MOLAWA. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 3(01), 20–39.  
<https://doi.org/10.62668/jide.v3i01.1012>

- Swastika, Y. ., & Hamid, N. . (2023). PENGARUH LITERASI KEUANGAN, GENERASI SANDWICH OVERCONFIDENCE DAN DUAL ERNEST TERHADAP PERILAKU KEUANGAN. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 2(03), 112–118. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i03.753>
- Taufikurrahman, T., Nisrina, A. Y. ., Sutrisno, A. I. ., Meiyantika, A. S. ., Pranata, H. A. ., & Bintari, P. F. . (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS APLIKASI PENCATATAN KEUANGAN SEBAGAI SARANA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA UMKM &quot;FINZA COOKIES AND CAKE&quot; DI DESA MRANGGONLAWANG KECAMATAN DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGO. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 2(02), 90–96. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i02.685>
- Ulfa Matoka, Muhammad Zain, Aldi Gunawan, & Putri Ayu Sriningsih. (2023). ANALISIS TRANSPORTASI DARAT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN WAKATOBI. *JIM : Journal Of International Management*, 1(02), 63–71. <https://doi.org/10.62668/jim.v1i02.278>